

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Husaini*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan perlu dirinci dan harus bersifat aplikatif. *Kedua*, perencanaan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dirumuskan dalam kebijakan pemerintah terdiri atas tiga bentuk program, yaitu program pengembangan diri, pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan pengembangan melalui budaya sekolah. Dari ketiga program tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam aspek perumusan maupun implementasinya. *Ketiga*, penilaian pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa menggunakan beberapa indikator penilaian, yakni: indikator untuk sekolah dan kelas, serta indikator untuk mata pelajaran. Format penilaian ini di satu sisi memiliki kelebihan dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan, namun dalam aspek sarannya hanya tertuju kepada siswa. Oleh karena itu, perlu disertakan format penilaian diri (*self-assesment*) agar pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa di lingkungan sekolah menjadi semakin efektif.

KATA KUNCI: *Pengembangan, Pendidikan, Budaya, Karakter, Sekolah.*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan dinamika perkembangan zaman, masyarakat Indonesia selalu dihadapkan pada banyaknya tantangan dan permasalahan, terutama yang terkait dengan persoalan budaya dan karakter bangsa. Maraknya praktek-praktek amoral, seperti korupsi, remanisme, pelanggaran HAM, kejahatan seksual, perusakan lingkungan, perkela-hian dan amuk massa, tawuran pelajar, turunnya kewibawaan guru di mata peserta didik, pola hidup yang konsumtif (Ratna Megawangi, 2003:2), dan lain sebagainya, merupakan di antara sekian banyak persoalan yang menjadi tantangan besar bangsa ini. Sejak beberapa decade lalu, isu tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa menjadi pembicaraan yang hangat dan mengemuka di tengah-tengah masyarakat, baik me-

lalui media massa, diskusi-diskusi, seminar dan sebagainya.

Perhatian masyarakat terhadap persoalan budaya dan karakter bangsa tersebut pada dasarnya juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga melahirkan berbagai bentuk kebijakan dan peraturan. Di antara peraturan yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang amanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum berdasarkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Terbitnya kebijakan ini pada dasarnya adalah kelanjutan dari tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang membahas ten-

*Pengawas Pendidikan Agama Islam, E-mail husaini@gmail.com, Hp.

tang Tujuan Pendidikan nasional. (UU No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 2005:2). Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa kemudian diperjelas dengan diterbitkannya beberapa kebijakan, di antaranya melalui rumusan kebijakan nasional tentang “Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa (Pedoman Sekolah) Tahun 2010,” yang di susun oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

Lahirnya kebijakan pemerintah terkait pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagaimana uraian tersebut di atas, selain didasarkan atas amanat undang-undang dan banyak masukan dari masyarakat, tidak bisa dilepaskan pula oleh pemikiran tentang perlunya usaha untuk mengurangi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan aspek budaya dan karakter bangsa. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif dan sarana pembangun generasi baru bangsa yang lebih baik yang diyakini mampu mengurangi berbagai persoalan yang terkait dengan budaya dan karakter bangsa. Kurikulum sebagai jantungnya pendidikan, dalam pengembangannya harus lebih banyak diarahkan pada penguatan nilai-nilai yang berhubungan dengan aspek budaya dan karakter bangsa. (Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Penelitian dan Pengembangan, 2010:1)

Melalui usaha yang bersifat pengembangan, pemerintah tampaknya mengharapkan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat dilakukan secara lebih maksimal, fungsional dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk melahirkan dan menumbuhkan pribadi-pribadi yang berbudaya dan berkarakter yang dapat menjadi kekuatan bangsa terutama untuk masa yang akan datang, kiranya akan mampu diwujudkan. Upaya ini sangat sejalan dengan semangat dan cita-cita besar bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam UUD 1945 dan tujuan pendidikan Nasional.

Berangkat dari konteks, hakikat dan spirit yang dikehendaki oleh pemerintah melalui kebijakan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, maka kajian yang mendalam terhadap kebijakan tersebut perlu dilakukan, agar dapat dipahami serta digali berbagai kelebihan dan kekurangan serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat secara umum dan dunia pendidikan secara khusus. Dengan dipahaminya berbagai aspek yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan berbagai alternatif perbaikan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut menjadi lebih baik.

PEMBAHASAN

Pembangunan watak bangsa sangat diperlukan mengingat bangsa Indonesia sangat heterogen dan memiliki kemajemukan. Dengan karakter yang tangguh, bangsa Indonesia akan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain, bahkan bukan tidak mungkin dapat melampaui kemajuan bangsa lain. Cita-cita mulia sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yakni untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bukanlah impian kosong. Cita-cita mulia ini memberi dorongan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (Eko Handoyo Tijan, 2010:1).

Pengembangan budaya dan karakter bangsa yang diupayakan melalui segmen pendidikan, merupakan salah satu langkah yang sangat strategis untuk mendukung upaya tersebut. Karena pendidikan merupakan sarana pembangun generasi yang cukup efektif untuk menanamkan segala bentuk nilai yang diperlukan. Melalui pendidikan yang dilaksanakan secara baik dan benar, diharapkan akan lahir manusia-manusia yang unggul dan berkualitas. Socrates menyatakan bahwa tujuan mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi “*good and smart*”. Manusia yang ter-

didik seharusnya menjadi orang bijak, yang dapat menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang baik (beramal shaleh), dan dapat hidup secara bijak dalam seluruh aspek kehidupan, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. (Imam Bernadib, 2002:42)

Lahirnya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara prinsip harus didukung. Kebijakan yang dihasilkan menjadi instrumen penting yang dapat mendorong pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa menjadi lebih massif. Namun demikian, sebagai produk kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari banyak unsur atau bisa jadi banyak kepentingan, maka segala kelebihan dan kekurangan serta implikasi yang terdapat di dalamnya perlu untuk terus dikaji dan dievaluasi. Berdasarkan fokus kajian yang telah dikemukakan, maka studi kebijakan tentang pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

Hakikat Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Berkenaan dengan hakikat pendidikan budaya dan karakter bangsa, di dalam rumusan kebijakan disebutkan bahwa "*pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional*" (Kementerian Pengembangan, 2). Jika dipahami secara seksama, perumusan makna pendidikan budaya dan karakter bangsa ini belum menunjukkan suatu konsep yang jelas tentang apa sesungguhnya pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pernyataan pengembangan nilai-nilai yang berasal dari ideologi bangsa, agama, budaya dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, lebih bersifat umum dan telah menjadi standar dari pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan kata lain, pernyataan di atas belum menjelaskan hakikat pendidikan

budaya dan karakter bangsa secara lebih spesifik.

Pemaknaan arti pendidikan budaya dan karakter bangsa pada rumusan kebijakan secara keseluruhan lebih dominan diuraikan dalam penjelasan yang terpisah, sesuai dengan masing-masing istilah yang terdapat dalam kalimat pendidikan budaya dan karakter bangsa. Narasi yang disampaikan dalam redaksi ini, di satu sisi memang perlu dilakukan pada awal penjelasan, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang definisi dari masing-masing kata dalam kalimat tersebut. Namun di sisi lain, dengan uraian yang hampir semuanya dijelaskan secara terpisah membuat pemahaman tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa menjadi kabur dan tidak integratif.

Kata "budaya" dan "karakter" yang disandingkan dengan kata "pendidikan" pada dasarnya memiliki masing-masing makna dan kadang digunakan untuk fungsi yang berbeda. Thomas Lickona memaknai pendidikan karakter sebagai pendidikan budi pekerti plus, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan menjadikan kecerdasan emosi sebagai target utamanya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting untuk persiapan seorang anak menyongsong masa depan (Thomas Lickona, 1991:23).

Terkait dengan makna budaya, para ahli tidak memiliki definisi yang sama karena masing-masing dengan penekanannya. Dari banyak makna tentang budaya, maka dapat dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya

ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat (Francis Mulhen, 2010:8, Abu Ahmadi, 2010:58).

Adapun pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan keterpaduan antara kata pendidikan, budaya dan karakter yang diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kesuma dalam hal ini merumuskan arti pendidikan budaya dan karakter bangsa secara lebih spesifik dan aplikatif, yakni pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (Dharma Kesuma dkk, 2011:10)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa pada hakekatnya adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak, dalam rangka mengembangkan kemampuan dan potensi kebaikan yang dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan budaya dan karakter bangsa terutama yang dilaksanakan di sekolah, merupakan pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensinya, menghayati dan menginternalisasikan nilai-nilai pada dirinya, sehingga mereka memiliki kepribadian yang utuh berdasarkan tujuan pendidikan yang telah digariskan. Dengan demikian, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan pendidikan yang berupaya melahirkan pribadi-pribadi yang baik dan mampu menyebarkan kebaikan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perencanaan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Perencanaan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dirumuskan oleh pemerintah melalui tiga program, yaitu: 1) program pengembangan diri; 2) pe-

ngintegrasian dalam mata pelajaran; dan 3) budaya sekolah. Dari ketiga program yang direncanakan ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah:

Pertama, pada program pengembangan diri secara konsep merupakan program yang dilaksanakan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, seperti kegiatan rutin sekolah, kegiatan yang bersifat spontan, keteladanan, dan pengkondisian (Kementrian Pengembangan, 15-17). Program pengembangan diri yang dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di sekolah ini mengisyaratkan adanya proses pembiasaan dalam aktivitas pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Artinya, upaya pendidikan dan penanaman nilai-nilai tidak hanya berlangsung pada jam pelajaran efektif, tetapi juga dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Hal ini, selain dapat mendorong pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah berjalan secara lebih terpadu, juga menjadikan proses pendidikan dapat terlaksana secara intens.

Hanya saja, proses pembiasaan yang telah menjadi salah satu metode dalam pembelajaran dalam pelaksanaannya lebih cenderung dilaksanakan dalam ruang lingkup pembelajaran di kelas. Begitupun program pengembangan diri yang seharusnya berlangsung pada setiap kegiatan dan waktu yang ada di sekolah, dalam implementasinya justru menjadi mata pelajaran tersendiri, sehingga menjadikan program pengembangan diri menjadi kaku dan tidak aplikatif. Proses pembiasaan yang menjadi semangat dari program pengembangan diri menjadi bias dalam pelaksanaannya. Faktor kesadaran, kepehaman, kesiapan dan kekakuan dari pihak yang melaksanakan pendidikan merupakan di antara penyebab hal ini terjadi, sehingga program pengembangan diri yang seharusnya menjadi proses pembiasaan bagi siswa menjadi bersifat formal dan keluar dari esensinya.

Kedua, perencanaan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan dengan pengintegrasian dalam mata

pelajaran melalui silabus dan RPP (Kementerian Pengembangan, 18). Secara konsep, usaha ini cukup berpotensi untuk mendorong pendidikan budaya dan karakter bangsa menjadi lebih luas cakupannya dan tidak menjadi kaku (terbatas) dalam pelaksanaannya. Karena secara mendasar, pendidikan budaya dan karakter bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru-guru tertentu yang dianggap bersentuhan langsung dengan nilai-nilai tersebut. Semua guru dituntut berperan serta dan menjadikan dirinya sebagai sosok teladan serta menjadi pengajar sesuai dengan tujuan utuh pendidikan (S. Hamid Hasan, 2000:36). Dengan demikian, pendidikan budaya dan karakter bangsa diharapkan dapat berjalan secara terpadu.

Sehubungan dengan pembelajaran terpadu, Cohen menyebutkan bahwa ada tiga kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), hari terpadu (*integrated day*), dan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) (S. Nyoman Degeng, 1989: 78) Adapun pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diintegrasikan dengan semua mata pelajaran sarannya adalah pada materi pelajaran, prosedur penyampaian, serta pemaknaan pengalaman belajar para siswa. Agar pembelajaran terpadu berjalan efektif dan sesuai dengan harapan, perlu memperhatikan persyaratan berikut, yaitu: 1) kejelian para guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan arahan pengait yang harus dikerjakan para siswa untuk menggiring terwujudnya kaitan-kaitan koseptual intra atau antar mata pelajaran; dan 2) penguasaan material terhadap bidang-bidang studi yang perlu dikaitkan (T. Raka Joni, 1996:102).

Adapun arahan pengait dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam konteks semua mata pelajaran dapat berupa pertanyaan yang harus dijawab atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para siswa yang mengarah kepada perkembangan pendidikan karakter dan pengembangan kualiti

tas kemanusiaannya. Dengan demikian, proses pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dilakukan secara integratif dan terpadu pada semua materi pelajaran dapat membuka ruang yang sangat luas untuk menanamkan nilai-nilai yang telah digariskan.

Namun demikian, pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diintegrasikan dengan semua mata pelajaran bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Konsekuensi yang bisa jadi muncul sebagai kelemahan dari pola pendekatan seperti ini adalah pada guru-guru yang tidak memiliki kesiapan, baik mental maupun keilmuan. Selain itu, proses integrasi di dalam mata pelajaran menuntut semua guru untuk terampil melaksanakannya di lapangan. Guru-guru yang tidak siap akan membuat program ini menjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga, budaya sekolah yang mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antar komponen di lingkungan sekolah, sejatinya menunjukkan bahwa sasaran dari program pendidikan budaya dan karakter bangsa tidak hanya tertuju pada siswa, tetapi juga semua unsur yang terdapat di sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan para staf. Namun, jika dipahami secara keseluruhan berdasarkan muatan kebijakan, maka program pengembangan tampaknya hanya tertuju kepada siswa. Kepala sekolah, guru dan yang lainnya dalam hal ini hanya bertindak sebagai pelaksana pendidikan. Jika berharap kebijakan yang dikeluarkan berjalan sukses, maka seluruh pelaksana pendidikan harus bertindak sebagai subjek sekaligus objek (sasaran) dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Walaupun harus dimaklumi bahwa untuk melihat hasil yang maksimal dari sebuah kebijakan yang baru berjalan beberapa tahun, tentu belum sepenuhnya bisa dilakukan. Karena terlalu awal untuk mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sudah gagal. Kebijakan masih dalam

proses pelaksanaan dan proses pendidikan itu sendiri tidak selalu bisa diukur dalam waktu yang singkat. Hanya saja, jika dikaitkan dengan semangat dan kebutuhan dari kebijakan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, maka besarnya angka pelanggaran dalam dunia pendidikan mengisyaratkan bahwa program pendidikan budaya dan karakter bangsa belum berjalan secara efektif.

Kasus-kasus pelanggaran, baik yang dilakukan oleh siswa maupun para pengelola pendidikan menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa belum berpengaruh secara signifikan dalam proses pendidikan secara praktis. Dengan kata lain, efek dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat dikatakan masih sangat lemah dan belum membawa perubahan yang berarti sesuai fungsi dan tujuannya. Kondisi ini semakin jelas apabila dihubungkan dengan beberapa persoalan lain yang masih banyak terjadi dalam dunia pendidikan, seperti tawuran pelajar di kota-kota besar yang kembali marak sejak tahun 2010, tindak kekerasan guru terhadap siswa, terkikisnya budaya lokal dan maraknya budaya asing di kalangan remaja, dan lain sebagainya.

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diupayakan melalui program budaya sekolah pada dasarnya merupakan langkah yang tepat. Karena budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personil sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007:55-56) Zamroni menambahkan, budaya sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan pan-

jang sekolah yang dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah (Zamroni, 2003: 149). Nilai-nilai yang akan dikembangkan melalui program budaya sekolah sesungguhnya tidak hanya terkait dengan siswa tetapi juga seluruh komponen yang ada di sekolah.

Namun perlu dicatat bahwa budaya sekolah tidak selalu bermakna positif. Menurut Mardapi, budaya sekolah terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 1) budaya sekolah yang positif, yakni kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan; 2) budaya sekolah yang negatif, yakni kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan, misalnya siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerja sama dalam memecahkan masalah; 3) budaya sekolah netral, yaitu kultur yang tidak berfokus pada satu sisi namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan, seperti arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa dan lain-lain (Djemari Mardapi, 2003:28). Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam memanfaatkan budaya sekolah sebagai program pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, pendidikan budaya dan karakter bangsa pada tingkatan institusi seharusnya mengarah pada pembentukan budaya sekolah yang benar-benar menyeluruh, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Dengan demikian, sasaran program dari pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah semua warga sekolah, meliputi para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah.

Penilaian Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Penilaian hasil belajar dalam rumusan kebijakan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa menggunakan beberapa indikator yang dijadikan standar penilaian dan dilakukan secara terus-menerus, yakni disetiap saat guru ada di kelas dan di sekolah. Ada dua jenis indikator yang dikembangkan dalam kebijakan ini, yakni: 1) indikator untuk sekolah dan kelas; serta 2) indikator untuk mata pelajaran. Indikator tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dan sekolah yang dilakukan melalui pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan peserta didik terhadap tugas dan pertanyaan guru, serta tulisan peserta didik dalam laporan dan pekerjaan rumah. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan berapa lama suatu perilaku harus dikembangkan sebelum ditingkatkan ke perilaku yang lebih kompleks (Kementerian Pengembangan, 23-25).

Penilaian (*assesment*) dalam konteks pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dari pertimbangan tertentu. Implikasinya, kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai dengan prinsip pedagogis (Nana Sudjana, 1991:13). Adapun prinsip-prinsip penilaian hasil belajar dalam konteks pendidikan yang bersifat nilai, di antaranya adalah: 1) keberlanjutan, dimana penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai; 2) keterpaduan, antara tujuan, materi, metode dan penilaian itu sendiri; 3) keterlibatan peserta didik, terutama dalam proses pendidikan yang menuntut keaktifan peserta didik; 4) pedagogis, maksudnya selain sebagai alat untuk mengukur keberhasilan belajar pe-

serta didik, juga sebagai upaya perubahan sikap mereka; 5) koherensi, yang mengharuskan adanya kaitan antara materi pelajaran yang disajikan dengan ranah kemampuan yang akan diukur; 6) akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk kepada peserta didik (Sudjana, 13-14).

Jika dikaitkan dengan sistem penilaian yang digunakan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa yang didasarkan atas indikator sebagai ukuran yang dilaksanakan secara terus-menerus selama siswa berada di sekolah, di satu sisi menuntut semua guru untuk fokus pada setiap aspek yang dilakukan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Artinya, selain menuntut kepekaan dan kesiapan guru, juga menuntut keprofesionalan guru sebagai seorang pendidik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sangat menekankan fokus guru sebagai pendidikan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam melakukan penilaian pada peserta didik. Di sisi lain, penilaian hasil belajar yang demikian, sepertinya hanya terbatas pada tugas guru dan selama siswa berada di lingkungan sekolah. Hal ini belum berkorelasi dengan aktivitas siswa ketika berada di luar sekolah. Jika pelaksanaan pendidikan dan penilaian budaya dan karakter tidak berkelanjutan hingga siswa berada di luar, bisa jadi pelaksanaannya tidak berjalan terlalu efektif.

Apabila dihubungkan dengan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diupayakan melalui program budaya sekolah, maka sasaran penilaian seharusnya menjadikan seluruh unsur sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya sebagai pihak yang juga harus dievaluasi. Evaluasi yang dimaksud bukan hanya pada wilayah tugas atau kinerja yang dilakukan, tetapi juga pada wilayah perkembangan kepribadian sebagaimana yang dilakukan terhadap siswa. Untuk itu, perlu ada bentuk penilaian yang ditujukan kepada pihak-pihak tersebut (nonsiswa), seperti bentuk

penilaian diri (*self-assesment*) yang berhubungan dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Penilaian diri ini dapat pula digunakan untuk menilai perkembangan siswa itu sendiri.

Reys, Suydam, Lindquist & Smith menyebutkan bahwa siswa merupakan penilai yang baik (*the best assessor*) terhadap perasaan dan pekerjaan mereka sendiri. Oleh karena itu, guru dapat memulai proses penilaian diri dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan validasi pemikiran mereka sendiri atau jawaban-jawaban hasil pekerjaan mereka. Penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri siswa (Robert E. Reys, Marilyn N. Suydam, Mary M. Lindquist & NL. Smith, 1998:33). Penilaian dapat dipikirkan sebagai rangkaian kesatuan dari kontrol guru untuk mengontrol. Keistimewaan rangkaian kesatuan ini menekankan pada meningkatnya tanggung jawab yang menempatkan siswa untuk belajar sendiri. Dari penilaian ini diharapkan efek dari proses pendidikan yang dilaksanakan selama di sekolah dapat tertanam sampai siswa berada di luar lingkungan sekolah.

Implikasi

Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang ditujukan kepada sekolah berimplikasi kepada besarnya tuntutan kepada pihak sekolah untuk siap secara utuh terutama dalam aspek sumber daya manusianya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Bagi sekolah-sekolah yang telah mapan, terutama dalam aspek sumber daya manusia (guru) serta didukung oleh tingginya tingkat kemakmuran dari pegawainya, upaya pelaksanaan kebijakan ini mungkin tidak terlalu jadi persoalan dan bahkan memang harus dilakukan. Namun bagi sekolah-sekolah yang belum mapan dan baru berkembang, seperti sekolah-sekolah swasta yang berada di daerah dengan segala keterbatasan yang dimiliki, maka kebijakan ini sangat sulit diwujudkan atau untuk tidak dikatakan agak memberatkan.

Namun demikian, implikasi positif dari adanya kebijakan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini menuntut setiap sekolah untuk benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pendidikan yang seharusnya membawa peserta didik kepada pengenalan nilai secara kognitif (*knowing the good*), penghayatan nilai secara afektif (*feeling the good*), dan pengamalan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan (*acting the good*), merupakan di antara spirit dan tujuan dari pelaksanaan dari pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dilaksanakan dengan baik akan berpotensi melahirkan generasi baru bangsa yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam setiap aspek kehidupannya sehari-hari. Apabila telah menjadi budaya dan karakter sehari-hari, maka diharapkan dapat menjadi budaya dan karakter, maka akan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari kehidupannya secara keseluruhan.

PENUTUP

Dari uraian singkat mengenai studi kebijakan tentang pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara konsep, pengertian pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan masih terlalu umum dan belum menunjukkan hakikat yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, sehingga menjadikan makna pendidikan budaya dan karakter bangsa kurang aplikatif. Selain itu, penjelasan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa lebih banyak diuraikan dengan makna masing-masing sesuai istilah yang terdapat dalam kalimat tersebut.
2. Perencanaan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dirumuskan dalam kebijakan pemerintah terdiri atas tiga bentuk program, yaitu: a) program pengembangan diri; b) pengin-

- tegrasian dalam mata pelajaran; dan c) budaya sekolah. Dari ketiga program tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam aspek perumusan maupun implementasinya;
3. Penilaian pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa menggunakan indikator sebagai standar penilaian dan dilakukan secara terus-menerus, yakni disetiap saat guru ada di kelas dan di sekolah. Ada dua jenis indikator yang dikembangkan dalam pedoman ini, yakni: a) indikator untuk sekolah dan kelas; dan b) indikator untuk mata pelajaran.

Bentuk penilaian ini di satu sisi memiliki kelebihan dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Namun di sisi lain, dalam aspek sasarannya hanya tertuju kepada siswa. Adapun unsur lain yang ada di sekolah kurang diperhatikan dan hanya bertindak sebagai penilai. Oleh karena itu, perlu disertakan bentuk penilaian diri (*self-assesment*) agar pelaksanaan Pendidikan budaya dan karakter bangsa di lingkungan Pendidikan semakin efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 2010, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernadib, Imam, 2002, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Degeng, S. Nyoman, 1989, *Taksonomi Variabel*, Jakarta: Depdikbud.
- Dimiyati dan Mudjiono, 2002, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2007, "Pengembangan Budaya dan Iklim Pembelajaran di Sekolah" dalam *Materi Diklat Pembinaan Kompetensi Calon Kepala Sekolah*, Jakarta.
- Hasan, S. Hamid, 2000,. *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joni, T. Raka, 1996, *Pembelajaran Terpadu*, Jakarta: Dirjen Dikti Bagian Proyek PPGSD,
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character*, New York: Bantam.
- Kesuma, Dharma, dkk, 2011, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardapi, Djemari, 2003, *Pola Induk Sistem Pengujian Hasil KBM Berbasis Kemampuan Dasar SMU: Pedoman Umum*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Dikmenum,.
- Mulhern, Francis, 2010, *Budaya Metabuaya*, Jakarta: Jalasutra.
- Ratna Megawangi, 2003, *Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani*, IPPK Indonesia Heritage Foundation,

Reys, Robert E., Suydam, Marilyn N., Lindquist, Mary M. & Smith, NL 1998, *Helping Children Learn Mathematics*, Boston: Ellyn & Bacon,

Sudjana, Nana, 1991, *Penilaian Hasil Proses Belajar dan Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Tijan, Eko Handoyo, 2010, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang*, Semarang: Widya Karya Press,.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Zamroni, 2003, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing,